

S A B U A

Volume 13 No.2, Tahun 2024

P-ISSN 2085-7020

Evaluasi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud

Evaluation of the National Strategic Activity Center Melonguane in Talaud Islands Regency

Liliani S. Linda^a, Raymond Ch. Tarore^b, Leidy M. Rompas^c

^aProgram Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

^bProgram Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

^cProgram Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

liliani.linda02@gmail.com

Abstrak

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pembangunan di kawasan perbatasan, dengan memiliki tiga fungsi utama PKSN, yaitu Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dan berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga, Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya, dan pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan Kawasan di sekitarnya. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi aspek-aspek apa saja yang terkait dengan ditetapkannya PKSN Melonguane serta mengevaluasi dari sejak ditetapkannya PKSN sampai dengan saat ini apakah ada peningkatan dan manfaat yang memberikan dampak bagi Kecamatan Melonguane. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa aspek yang mendukung Kabupaten Kepulauan Talaud sehingga adanya PKSN Melonguane dan hasil evaluasi peningkatan serta manfaat yang terjadi.

Kata kunci: Evaluasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional, Pertumbuhan Ekonomi

Abstract

The National Strategic Activity Center is an urban area designated to promote development in border regions, with three main functions: an urban center that has the potential to serve as a border checkpoint and functions as an international gateway connecting with neighboring countries, an urban center that is an economic growth center capable of driving the development of the surrounding region. The purpose of this research is to identify the aspects related to the establishment of the National Strategic Activity Center in Melonguane and to evaluate whether there has been any improvement and benefits that have impacted the Melonguane District since the establishment of the National Strategic Activity Center. The type of research used in this study is descriptive research with a quantitative method approach. The results of this research produced several aspects that support the Talaud Island Regency, leading to the establishment of the Melonguane PKSN and the evaluation of the improvements and benefits that occurred

Keyword: Evaluation, National Strategic Activity Center, Economic Growth

1. Pendahuluan

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan salah satu wilayah penting di Indonesia yang memegang peran strategis dalam sejumlah aspek penting. Sebagai wilayah pesisir, memiliki akses langsung ke laut dan terletak dekat dengan perbatasan laut negara tetangga, yaitu Filipina. Keadaan ini memberikan potensi besar bagi wilayah ini untuk menjadi pusat kegiatan strategis nasional dalam beberapa sektor, termasuk ekonomi, perdagangan, pertahanan, dan pelayanan maritim. Sehingga wilayah ini ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang ada di Indonesia, yaitu PKSN Melonguane. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin melakukan penelitian mengenai evaluasi pusat kegiatan strategis nasional Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa saja yang terkait dengan ditetapkannya PKSN Melonguane dan mengevaluasi dari sejak ditetapkannya PKSN sampai dengan saat ini apakah ada peningkatan dan manfaat yang memberikan dampak bagi kecamatan Melonguane. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kuantitatif. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan analisis uji perbedaan dua rata-rata untuk sampel tak bebas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan sebelum dan sesudah ditetapkan. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mempelajari perbedaan rata-rata variabel kriteria dari dua kelompok, atau dari data yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok tersebut.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data melalui kuesioner, observasi, dan wawancara. Variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Variabel Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator	Parameter
PKSN	Pos Lintas Batas Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Pos Imigrasi - Pos Kepabeanan - Pos Karantina - Pos Keamanan 	Luas bangunan Pos Lintas Batas Internasional minimal 600 m ² berdiri di atas tanah minimal seluas 5.000 m ² . (Sumber: PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2007)
	Simpul Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pelabuhan - Bandar Udara - Terminal 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan Simpul Transportasi - Kondisi Simpul Transportasi
	Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Laju Pertumbuhan PDRB - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 	Tahun 2014-2023
Kabupaten Kepulauan Talaud	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> - Infrastruktur Konektifitas Wilayah - Infrastruktur Pelayanan Kesehatan - Infrastruktur Pendidikan - Infrastruktur Permukiman - Pelayanan Pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan Infrastruktur - Perkembangan

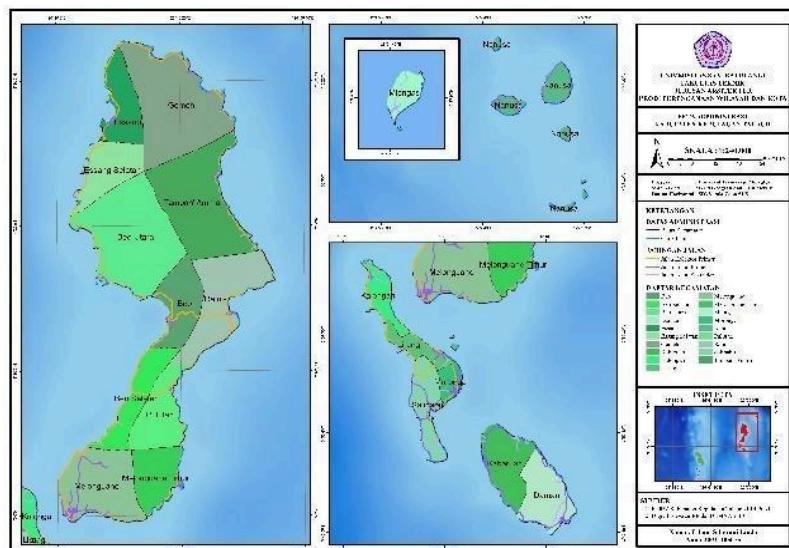
3. Kajian Literatur

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, PKSN merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendukung pembangunan kawasan perbatasan. Dengan ditetapkannya PKSN, diharapkan wilayah perbatasan dapat tumbuh lebih maju dan mandiri, serta memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) adalah pintu gerbang strategis yang mendukung pelayanan kepada pelintas batas antar negara. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS), simpul transportasi didefinisikan sebagai tempat yang berfungsi untuk kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, mengatur perjalanan, serta sebagai tempat perpindahan antara moda transportasi yang berbeda (intramoda dan antarmoda).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Wilayah

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten ini memiliki ibukota di Melonguane, yang terletak sekitar 271 mil laut dari ibukota Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Manado. Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Talaud terletak antara $3^{\circ} 38'$ Lintang Utara dan $5^{\circ} 33'$ Lintang Selatan dan antara $126^{\circ} 38'$ - $127^{\circ} 10'$ Bujur Timur dengan luas wilayah $1251,02 \text{ km}^2$ yang terdiri dari 19 Kecamatan yang terletak di 3 pulau besar dan 2 kepulauan.



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Talaud

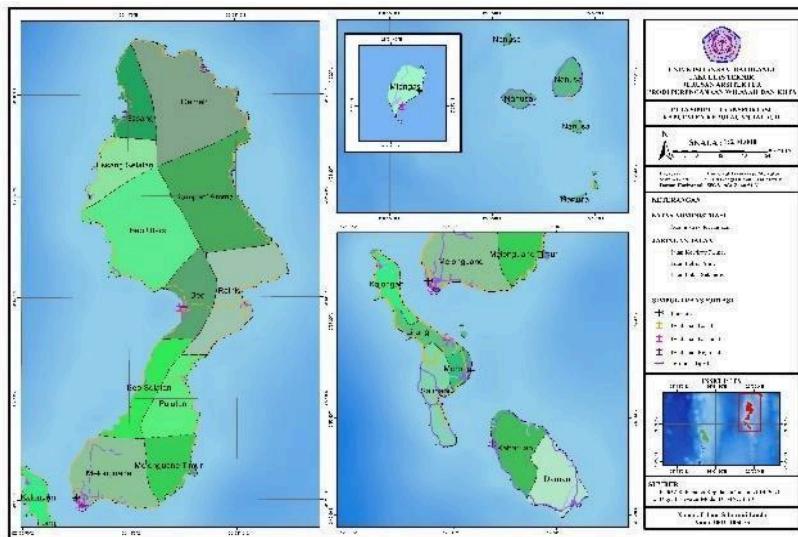
4.2 Identifikasi Aspek-Aspek PKSN Melonguane

Diketahui bahwa Perkembangan Panjang Jalan menurut Jenis Jalan yang ada di Kabupaten kepulauan Talaud mengalami peningkatan atau perkembangan pada tahun 2014 jumlah panjang jalan 353,811 km dan pada tahun 2024 berkembang menjadi 477,475 km. Sedangkan untuk pelayanan operator telepon seluler hanya ada 1 yaitu jasa pelayanan dari Telkomsel.

Di Kabupaten Kepulauan Talaud, sarana kesehatan terdiri dari berbagai jenis fasilitas, seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, dan apotek.

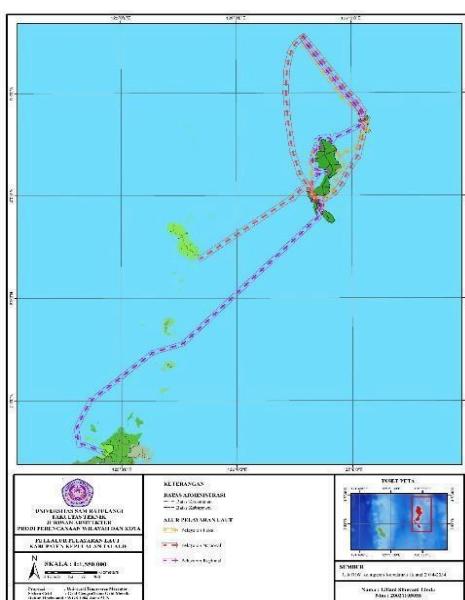
Secara keseluruhan sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud meliputi TK, SD, SMP, SMA/SMK. Jumlah sarana unit SD adalah jenis pendidikan yang terbanyak di Kabupaten Kepulauan Talaud. Sedangkan wilayah yang memiliki jumlah sarana pendidikan yang paling banyak terletak di Kecamatan Gemeh.

Penggunaan air bersih di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud berupa PDAM, sumur dan mata air. Sedangkan untuk jaringan listrik, jumlah keluarga yang menggunakan listrik dari PLN sebanyak 28.305 keluarga dan yang menggunakan non-PLN 9 keluarga. Sarana Pemerintahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud berupa Kantor Desa, Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan, Kantor Bupati, dan Kantor Dinas-Dinas Pemerintahan lainnya. Simpul Utama Transportasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu Pelabuhan Laut, Bandar Udara dan Terminal.



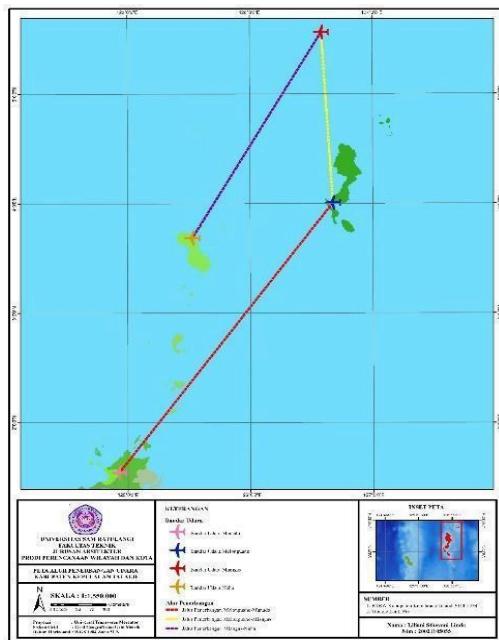
Gambar 2. Peta Simpul Transportasi di Kabupaten Kepulauan Talaud

Pelabuhan yang merupakan simpul utama transportasi laut di Kabupaten Kepulauan Talaud berada di Pelabuhan Melonguane yang menghubungkan daerah ini dengan daerah lain di Sulawesi Utara seperti, Siau, Tagulandang, Sanger dan Kota Manado. Selain Pelabuhan Melonguane, juga terdapat dua Pelabuhan lainnya yang menghubungkan daerah ini dengan daerah lain di Sulawesi Utara, yaitu Pelabuhan Lirung dan Pelabuhan Beo.



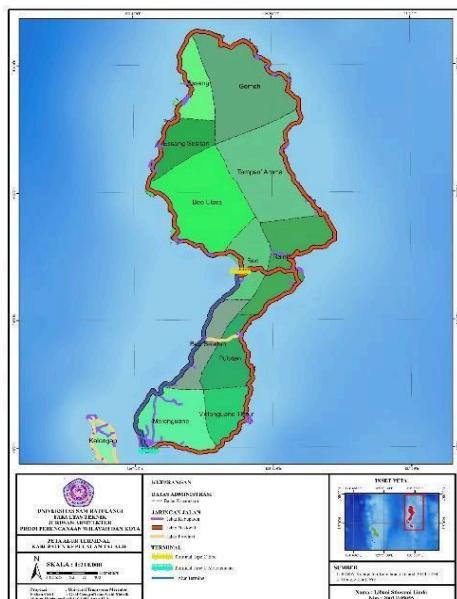
Gambar 3. Peta Alur Pelayaran Laut

Di Kabupaten Kepulauan Talaud terdapat 2 (dua) bandara yang terletak di Kecamatan Melonguane dan Kecamatan Miangas. Bandara Melonguane merupakan simpul transportasi udara utama di Kabupaten Kepulauan Talaud. Bandara ini melayani penerbangan domestik yang menghubungkan Melonguane dengan kota Manado dan Melonguane dengan Miangas. Sedangkan untuk bandara Miangas juga melayani penerbangan domestik yang menghubungkan Miangas dengan Melonguane dan Miangas dengan Naha (Sangihe).



Gambar 4. Peta Alur Penerbangan Udara

Terminal yang berada di Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan terminal tipe C. Terminal tipe C adalah terminal angkutan yang melayani rute angkutan dalam kota dan pedesaan. Terminal ini biasanya berfungsi sebagai titik awal atau akhir perjalanan bagi angkutan umum yang beroperasi di dalam wilayah kabupaten atau kota. Jumlah terminal tipe C di Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak 2 terminal tipe C yang lokasinya berada di Kecamatan Melonguane dan Kecamatan Beo. Angkutan umum yang melayani di wilayah ini berupa bentor dan mobil penumpang. Bentor singkatan dari Becak Motor yang merupakan kendaraan beroda tiga yang mirip seperti becak.



Gambar 5. Peta Alur Terminal

Di Wilayah PKSN Melonguane sudah terdapat pos keimigrasian, pos karantina, pos kepabeanan, dan pos keamanan yang terdapat di salah satu Lokasi Prioritas yaitu Kecamatan Miangas. Sedangkan untuk pos administrasi pengelolaan belum tersedia.



Gambar 6. (a) Pos Imigrasi; (b) Pos Karantina; (c) Pos Kepabeanan; (d) Pos Keamanan

4.3 Mengevaluasi Peningkatan Menggunakan Uji Paired Sample T Test

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	SEBELUM	31.8088	68	2.92828	.35511
	SESUDAH	46.1912	68	1.59530	.19346

Gambar 7. Output "Paired Samples Statistics"

Dari gambar di atas menunjukkan adanya perbedaan atau peningkatan antara sebelum dan sesudah ditetapkan PKSN Melonguane karena nilai rata-rata sebelum lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata sesudah.

Paired Samples Correlations					
		N	Correlation	Sig.	
Pair 1	SEBELUM & SESUDAH	68	.391	<.001	

Gambar 8. Output "Paired Samples Correlations"

Karena nilai **Sig. <0,001** lebih kecil dari probabilitas **0,05**, dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel sebelum dan variabel sesudah.

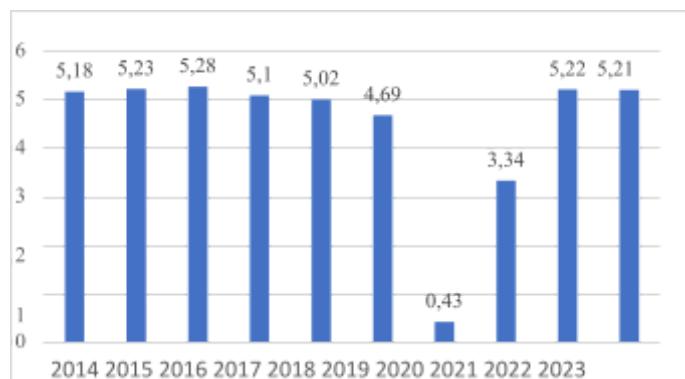
Paired Samples Test									
		Paired Differences		95% Confidence Interval of the Difference			t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper			
Pair 1	SEBELUM - SESUDAH	-14.38235	2.73195	.33130	-15.04363	-13.72108	-43.412	67	<,001

Gambar 9. Output "Paired Samples Test"

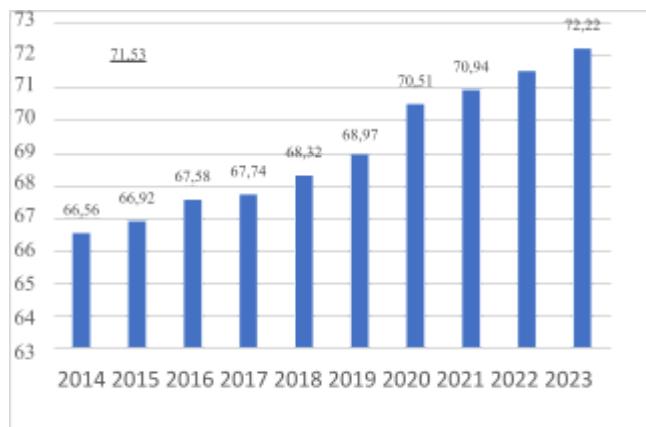
Berdasarkan *Paired Samples Test* terlihat bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* adalah <0,001, yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum dan sesudah, yang mengindikasikan adanya peningkatan di Kabupaten Kepulauan Talaud setelah Melonguane ditetapkan sebagai PKSN.

4.4 Evaluasi Peningkatan dan Manfaat Bagi Kecamatan Melonguane Berdasarkan Kondisi Lapangan

Kondisi fisik jalan yang ada di Kecamatan Melonguane sudah semakin membaik dari tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar jalan sudah aspal tapi masih ada beberapa jalan yang belum aspal. Kecepatan internet di Melonguane pada awalnya sangat rendah bahkan di pusat kecamatan. Pengguna hanya memiliki akses internet melalui jaringan 2G atau jaringan yang sangat lambat, yang hanya cukup untuk komunikasi dasar seperti SMS dan panggilan suara, sekarang peningkatan kecepatan internet dengan jaringan 3G dan 4G membuat akses lebih mudah bagi masyarakat. Sebelum PKSN, Sumber air bersih di Melonguane terbatas pada sumur, sungai, dan mata air. Pasokan air bersih sering kali tidak stabil, terutama saat musim kemarau ketika sumber air alami mengering dan sekarang Pemerintah bersama pihak terkait telah membangun lebih banyak sumber air bersih, seperti sumur bor dan penampungan air. Sebelum PKSN, akses listrik di Melonguane pada awalnya terbatas dan tidak stabil, sering terjadi pemadaman mendadak karena keterbatasan kapasitas pembangkit listrik dan jaringan distribusi dan sekarang Infrastruktur listrik di Melonguane telah meningkat, dengan jaringan yang lebih luas dan mencakup lebih banyak rumah tangga. Peningkatan jaringan listrik di Melonguane telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dalam hal akses, dan kualitas listrik.

**Gambar 10.** Laju Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Kepulauan Talaud

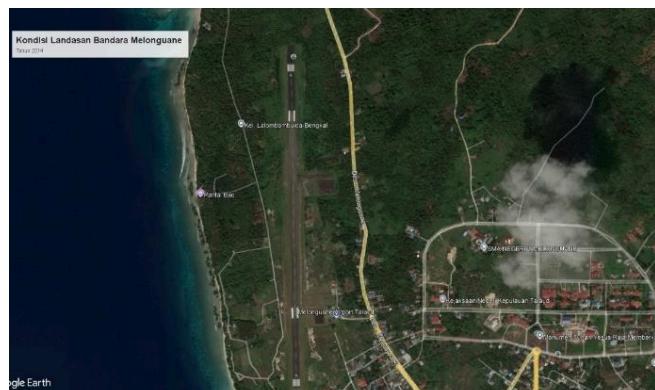
Tingkat Pertumbuhan PDRB yang ditampilkan di atas memperlihatkan adanya penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan PDRB tercatat sebesar 4,69%, namun menurun menjadi 0,43% pada tahun 2020. Selanjutnya, pada periode 2021 hingga 2022 terjadi peningkatan, meskipun pada tahun terakhir, yakni 2023, pertumbuhan PDRB kembali mengalami sedikit penurunan.



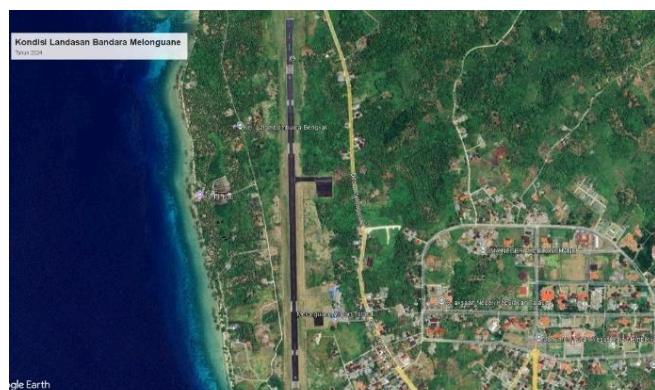
Gambar 11. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014-2023

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan Indeks Pendapatan Manusia di Kabupaten Kepulauan Talaud menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Talaud berhasil meningkatkan kualitas pembangunan manusia dari tahun 2014-2023 dengan baik. Dengan adanya peningkatan pada IPM akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat fondasi pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dengan memperbaiki kualitas hidup dan menciptakan peluang yang lebih besar bagi setiap individu untuk berkembang.

Peningkatan yang terjadi di Bandar Udara Melonguane yaitu Panjang Landasan Pacu. Panjang landasan pacu bandar udara Melonguane pada tahun 2014 sepanjang 1.482 meter dengan lebar 35 meter dan saat ini landasan pacu memiliki panjang 1.850 meter dan lebar 35 meter.



Gambar 12. Bandar Udara Melonguane Tahun 2014



Gambar 13. Bandar Udara Melonguane Tahun 2022

Kecamatan Melonguane memiliki dua pelabuhan, yaitu pelabuhan utama dan pelabuhan Ferry. Dua pelabuhan tersebut mengalami peningkatan. Pelabuhan utama Melonguane dulunya tidak memiliki Terminal penumpang serta kurangnya petugas keamanan dan sekarang pelabuhan ini sudah memiliki terminal penumpang yang menyediakan fasilitas seperti ruang tunggu, toilet dan area istirahat yang meningkatkan kenyamanan penumpang selama menunggu keberangkatan atau setelah tiba di pelabuhan dan untuk keberadaan petugas keamanan yang lebih banyak.



Gambar 14. Kondisi Terminal Penumpang Melonguane

Pelabuhan Ferry juga mengalami peningkatan yang dulunya pada tahun 2022 pernah sementara tidak bisa beroperasi dikarenakan banyak fasilitas yang rusak, tapi sekarang sudah diperbaiki dan pelabuhan ferry sudah kembali beroperasi lagi.



Gambar 15. Kondisi Pelabuhan Fery Tahun 2022



Gambar 16. Kondisi Pelabuhan Fery Tahun 2024

Terminal yang ada di Kecamatan Melonguane ada 1 terminal tipe C. Terminal ini cukup

meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yaitu peningkatan tempat parkir dan peningkatan fasilitas penumpang berupa adanya toilet. Terminal ini belum memiliki ruang tunggu bagi penumpang.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan yang didapat yaitu hasil identifikasi aspek-aspek yang terkait dengan ditetapkannya PKSN Melonguane terdiri dari Infrastruktur Konektivitas Wilayah yang terdiri dari infrastruktur jalan dan infrastruktur telekomunikasi, Infrastruktur Kesehatan, Infrastruktur Pendidikan, Infrastruktur Permukiman, Pelayanan Pemerintahan, Simpul Utama Transportasi, dan Pos Lintas Batas Negara. Pos lintas batas yang berada di PKSN Melonguane ada 4 (empat), yaitu pos pemeriksaan imigrasi, pos pemeriksaan bea cukai, pos pemeriksaan karantina dan pos pemeriksaan keamanan. Sedangkan untuk simpul transportasi yang ada di Wilayah PKSN Melonguane, yaitu bandar udara, pelabuhan, dan terminal. Dan Berdasarkan hasil uji *Paired Sample T-Test* di SPSS dan berdasarkan kondisi lapangan, didapatkan bahwa adanya peningkatan dari sebelum ditetapkan PKSN Melonguane dan setelah ditetapkan sehingga memberikan berbagai manfaat di Kecamatan Melonguane dan berdampak menjadikan wilayah ini semakin berkembang. Tetapi ada juga yang tidak mengalami peningkatan yaitu Terminal melonguane dan infrastruktur pendidikan.

Referensi

- F A A Panutan, E Fatimah, Sugihartoyo. 2019. *Upaya Pengembangan PKSN Jasa di Kawasan Perbatasan Negara Kabupaten Sintang*. Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Wilayah Dan Kota Berkelanjutan. Universitas Trisakti.
- A C Dewi Permata Putri, Aris Subagyo, Agus Dwi Wicaksono. 2019. *Faktor Yang Berpengaruh Dalam Kesenjangan Wilayah di Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara*. Jurnal. Universitas Brawijaya.
- Posma Sariguna, Johnson Kennedy, S J L Tobing, R L Toruan, Emma Tampubolon. 2019. *Analisis Masalah Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antara Provinsi Maluku dan Negara Timor Leste*. Jurnal. Universitas Kristen Indonesia.
- Novana Veronika Julenta Kareth. 2022. *Penegakan Hukum Oleh Pos Lintas Batas Bagi Para Pelintas di Wilayah Perbatasan Papua dan Papua New Guinea*. Jurnal.
- Engelbertus Tobu, Yohanes Arman, K Maharani Mamengko. *Analisis Masalah Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antara Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Negara Timor Leste*. Jurnal. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Noor Alvilaili. *Pengelolaan Kawasan Perbatasan Dalam Pendekatan Kesejahteraan*. Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 Tentang *Standardisasi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara*. 26 Maret 2007. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2005 tentang *Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS)*.
- Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Angka. Badan Pusat Statistik.

